



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemprov Bentuk Timsus

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah membentuk tim khusus (Timsus) penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebab, catatan temuan setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 22 Mei lalu, atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 itu, belum mencapai target 75 persen. Meskipun telah diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan, terhitung penyerahan opini WTP.

Inspektur Pemprov Bengkulu Dr H Heru Susanto mengatakan, Timsus itu telah dibagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK.

"Kita di provinsi sudah ditunjuk untuk tindak lanjut per OPD. Khusus percepatan 75 persen," ujar Heru kepada BE, kemarin (16/9).

Dijelaskannya, selama deadline 60 hari penyelesaian temuan catatan BPK itu, Pemprov sudah terus melakukan tindak lanjut. Namun laporan hasil tindak lanjut itu sudah disepakati duduk bersama per semester. Sehingga hasil laporan tindak lanjut berkala, belum seluruhnya diberikan kepada BPK.

"Duduk bersama tindak lanjut itu biasanya per semester," tambahnya. Heru menjelaskan, memang saat ini BPK telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Upaya itu telah dilakukan. Hanya saja, meski telah menggunakan aplikasi berbasis web, pihaknya tetap harus berkoordinasi dengan Tim BPK.

"Memang kita boleh mengangsur, tentu berkoordinasi dengan Tim BPK," ungkap Heru. Dalam penyelesaian temuan BPK, Pemprov berupaya penuh menyelesaikannya. Progresnya sudah membaik. Bahkan, dalam perjanjian kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Bengkulu sudah mencapai 80 persen. "Tentu kita akan kejar cepat penyelesaiannya," tegas Heru.

Untuk diingat, temuan BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu itu seperti pengelolaan kas belum memadai. Permasalahan itu antara lain, masih terdapat bendahara pengeluaran yang menyimpan uang tunai pada brankas dengan

nominal melebihi ketentuan. Terdapat 236 rekening pada Bank Bengkulu yang tidak memiliki dasar hukum.

Lalu, pengelolaan persediaan belum memadai. Permasalahannya, penatausahaan atas persediaan rusak/kadaluarsa belum memadai. Bukti masuk dan keluar barang dan/atau kartu persediaan belum seluruhnya tersedia. Terdapat persediaan yang belum dilaporkan dalam saldo persediaan pada neraca per 31 Desember 2021 dan tempat penyimpanan persediaan tidak memadai.

Kemudian, pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Seperti, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memadai. Terdapat pengeluaran belanja tidak sesuai ketentuan serta kurang volume pekerjaan. Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Selanjutnya, pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan. Permasalahannya berupa, kurang volume dan

pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kontrak pekerjaan gedung dan bangunan serta jalan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhamad Toha Arafat SE MSi Ak CA CSFA CFA mengemukakan, tindak lanjut temuan BPK se-Provinsi Bengkulu itu baru 73 persen atau belum mencapai 75 persen target nasional. Capaian itu sudah disampaikan dengan Gubernur Bengkulu. Agar percepatan bisa dilakukan, BPK sudah menyiapkan aplikasi SIPTL. "Adanya aplikasi itu, bisa memperbaharui atau mengupdate info terkait tindak lanjut. Dimana saja dan kapan saja bisa dilakukan, tanpa harus kontak fisik," ungkap Toha.

Percepatan tindak lanjut itu, bisa diselesaikan bersama-sama. Fungsi DPRD Provinsi, kabupaten dan kota bisa ikut membantu mendorong penyelesaiannya. "Agar tindak lanjutnya dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK itu bisa ditindak lanjut," tutupnya. (151)